**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manajer perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Widanaputra dan Ratnadi, 2008). Oleh sebab itu, manajemen berupaya agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai. Namun, manajemen dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri yang sering kali tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Sebagaimana disampaikan oleh Sanjaya dan Christiani (2012) yang mengemukakan bahwa keputusan manajer tidak selalu menjadi keputusan optimal yang semestinya memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika para investor sebagai pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmurannya, tetapi di sisi lain pihak manajer memiliki keinginan agar kesejahteraannya bertambah (Herawaty, 2008). Pemilik ingin memaksimalkan harga sekuritas dan *return* dari investasinya, tetapi manajer memiliki kebutuhan yang lebih luas, salah satunya memaksimalkan kompensasi yang akan diterimanya (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006).

Seorang pemilik perusahaan dan pemegang saham terkadang hanya menginginkan hasil akhir yaitu memperoleh laba yang tinggi. Sedangkan manajer memiliki tujuan untuk mendapatkan upah atau gaji yang tinggi pula untuk mengganti kontribusi atas apa yang diberikan pada perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini tentunya menimbulkan masalah keagenan. Sebagai upaya untuk mengurangi atau mengeliminir masalah keagenan, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya agar kepentingan agen dan *principal* menjadi selaras. Biaya tersebut disebut biaya keagenan. Selaras dengan hal tersebut, McKnight dan Weir (2009) berpendapat bahwa biaya keagenan terjadi disebabkan oleh kepentingan pemilik dan manajer yang tidak sejalan sebagai akibat pemisahan antara pemilik dan pengelola. Perbedaan kepentingan yang terjadi memicu manajer untuk bertindak opurtunistik. Para manajer terdorong untuk mengambil alih sumber daya bisnis, yang kalau tidak dilakukan, akan memberikan pengembalian (*return*) kepada pemilik (Miller dan Breton, 2006). Biaya keagenan dapat muncul dalam bentuk perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri atau pengambilan keputusan pada investasi yang tidak optimal (Gul S., Muhammad S., Nasir R., Farman A., 2012).

Dalam upaya mengurangi konflik kepentingan, diperlukan adanya mekanisme dan peraturan pengendalian yang mampu menjadi arahan bagi kegiatan operasional perusahaan (Boediono, 2005). Pemisahan antara pemilik dan pengelola menyebabkan manajer sebagai pengelola memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik, sehingga memungkinkan manajer bertindak curang. Masalah keagenan yang muncul antara *principal* dan *agent* mendorong penerapan *good corporate governance* yang diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan (Kamyarta, 2007).

*Good corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory*, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Terin Tanadi, 2014).

Isu *corporate governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjutkan dengan kejatuhan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002, serta ada isu krisis *subprime mortage* di Amerika Serikat tahun 2008 menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan *good corporate governance*. Selain peristiwa yang terjadi di luar negeri, di Indonesia pun peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh *corporate governance* yang buruk juga terjadi, yaitu salah satunya ada kasus Lippo (Sukmawati, 2004).

*Good corporate governance* merupakan hal yang harus dijalankan oleh perusahaan. Selaras dengan hal tersebut, John Core, David F.L., dan Robert W.H. (1999) menjelaskan perusahaan menghadapi masalah keagenan yang lebih tinggi saat struktur *corporate governance* lemah. Adanya *divergence of interest* antara *principal* dan *agent* mencerminkan *weak governance* yang merupakan bagian dari *agency cost* (Putri, 2012).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan juga melibatkan perilaku para eksekutif puncak perusahaan yang memerlukan pengendalian guna melindungi kepentingan pemilik perusahaan (Kusumawati dan Riyanto, 2005). Oleh sebab itu, penerapan *good corporate governance* harus mampu diterapkan secara berkelanjutan. *Corporate governance* bukan hanya tentang pengelolaan perusahaan saja, ruang lingkupnya lebih luas meliputi keadilan serta administrasi yang transparan dan efisien untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Bairathi, 2009).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia ada lima prinsip utama untuk tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Mukhtaruddin, 2014). Lima prinsip utama ini sangat penting meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan suatu perusahaan dan yang paling penting memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Priska K. D., 2016).

Penerapan *Good Corporate Governance* belum tentu benar-benar dapat mengurangi masalah keagenan yang ada di dalam perusahaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang manajer tidak terlepas dari adanya pertimbangan mengenai faktor ketidakpastian bagi perusahaan. Faktor risiko bisnis saat keputusan diambil merupakan suatu tindakan yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin besar penyimpangan keuntungan yang sesungguhnya dengan keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar tingkat risiko yang harus ditanggung. Dalam kondisi perusahaan yang menghadapi risiko bisnis yang tinggi, maka diperlukan daya inovasi dan kreatifitas serta kecepatan manajer dalam mengambil keputusan. Situasi ini tidak akan terjadi dalam perusahaan yang mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang terlalu ketat. Dengan demikian, implementasi tata kelola perusahaan belum tentu menyelesaikan masalah keagenan.

Fenomena yang terkait dengan teori keagenan khususnya berhubungan dengan mekanisme *good corporate governance* dan biaya agensi. Khususnya di pasar modal Indonesia saat ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengembangkan bebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan harapan dapat mengurangi masalah keagenan.

Berdasarkan pada pengolahan 5 (lima) sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI dapat dijelaskan mengenai fenomena yang berkembang di Indonesia khususnya yang terkait dengan mekanisme *good corporate governance* dan *agency cost*.

**Tabel 1.1**

*Agency Cost* yang diukur dengan menggunakan *Total Asset Turnover* (TATO)



Tabel 1.1 di atas menggambarkan besaran *Agency Cost* yang diukur dengan *Total Asset Turnover* (TATO). Kelima perusahaan yang dijadikan sebagai sampel di atas adalah 5 perusahaan sektor manufaktur dengan total penjualan tertinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Tabel 1.1 di atas menunjukan *Total Asset Turnover* ada yang mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya seperti Gudang Garam Tbk., tetapi ada juga perusahaan yang *Total Asset Turnover*nya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, seperti HM Sampoerna Tbk, sedangkan *Total Asset Turnover* yang mengalami fluktuasi, yaitu Unilever Tbk yang naik di tahun 2016, dan turun di tahun 2017.

Fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan adalah *monitoring* oleh Dewan Komisaris. Dalam rangka untuk meningkatkan transparansi perusahaan yang merupakan salah satu prinsip dalam penerapan *good corporate governance* diperlukan adanya keberadaan dewan komisaris yang dianggap lebih objektif dalam melakukan pengambilan keputusan.

Berikut adalah tabel persentase kehadiran rapat dewan komisaris pada 5 perusahaan sektor manufaktur dengan penjualan terbesar.

**Tabel 1.2**

Persentase Kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada 5 Perusahaan Manufaktur



Tabel 1.2 di atas menunjukkan persentase kehadiran rapat dewan komisaris di 5 perusahaan manufaktur dengan penjualan terbesar yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Persentase kehadiran rapat Unilever Tbk. menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 1,6%, dan pada periode yang sama *Total Asset Turnover*nya mengalami kenaikan sebesar 3,13% yang menunjukkan *agency cost* mengalami penurunan, karena semakin tinggi *Total Asset Turnover,* maka menunjukkan manajer menggunakan uang perusahaan untuk keperluan investasi, bukan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga *agency* cost rendah. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. persentase kehadiran rapat dewan komisarisnya menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 15,04%, namun pada periode yang sama *Total Asset Turnover*nya mengalami kenaikan sebesar 3,59% yang menunjukkan *agency cost* mengalami penurunan. Fenomena lainnya dapat dilihat pada Indofood Sukses Makmur Tbk., persentase kehadiran rapat dewan komisaris perusahaan ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 2%, namun dapat dilihat pada periode yang sama *Total Asset Turnover*nya mengalami penurunan sebesar 1,75% yang menandakan *agency cost* mengalami kenaikan.

Fenomena-fenomena ini menggambarkan bahwa peningkatan atau penurunan persentase kehadiran rapat dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan berdampak pada peningkatan atau penurunan *agency cost* yang dimana fenomena ini akan dikaitkan dengan mekanisme *good corporate governance. Good corporate governance* dikenal oleh masyarakat luas sebagai struktur dan sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang dapat mengurangi *agency cost.* Tetapi, beberapa penelitian yang bersifat akademi telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur dan mekanisme *corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan (Young, 2003). Dengan demikian pengaruh dari *corporate governance* terhadap *agency cost* menunjukan hasil yang simpang siur.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti *good corporate governance* dan biaya keagenan. Linda (2012) meneliti tentang “Mekanisme Corporate Governance dan Biaya Agensi”. Proksi untuk biaya agensi yang digunakan dalam studi ini: rasio biaya operasi dan rasio pemanfaatan aset. Analisis ini menggunakan teknik PLS. Hasil penelitiannya menunjukkan persentase direktur non eksekutif, persentase direktur eksekutif, dan hutang jangka pendek. tidak memengaruhi biaya keagenan, komite audit berpengaruh negatif pada biaya keagenan, dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif pada biaya keagenan.

Nanda dan Gerianta (2016) meneliti tentang “Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap *Agency Cost*”. Pengamatan dilakukan di seluruh sektor perusahaan pada periode 2009-2013. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga 92 sampel diambil sesuai kriteria. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *corporate governance* dan *leverage* berpengaruh negatif pada biaya keagenan. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* dan *leverage* berpengaruh positif signifikan pada biaya keagenan. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya *corporate governance* dan *leverage* dalam suatu perusahaan, maka biaya keagenan juga semakin meningkat.

Chrisostomos Florackis (2008) meneliti tentang “*Agency Costs and Corporate Governance Mechanisms: Evidence For UK Firms*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, dan kompensasi manajer, berpengaruh positif pada biaya keagenan, dan *board size* memiliki pengaruh negatif pada biaya keagenan.

Sanjaya dan Christianti (2012) meneliti tentang “*Corporate Governance and Agency Cost: Case in Indonesia*”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan komposisi komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap biaya keagenan.

Wulan dan Maria (2014) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Struktur Modal Terhadap *Agency Cost* Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”. *Corporate governance* diproksikan dengan *board of commissioner size* dan proporsi dewan komisaris. Struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sedangkan, struktur modal diproksikan dengan *debt-to-asset ratio. Agency cost* pada penelitian ini diproksikan dengan *asset utilization ratio.* Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel dengan uji analisis *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost*. Selanjutnya, secara parsial hasil penelitian ini menunjukan bahwa *board of commissioner size*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *debt-to-asset ratio* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap *agency cost.*

Muhammad, F. Siddiqui, Nazir R., Fakhra M., Sajid G (2013) meneliti tentang “*Internal Corporate Governance Mechanisms and Agency Cost: Evidence from Large KSE Listed Firms*”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *internal corporate governance mechanisms* yang diukur dengan menggunakan CEO *tenure* dan rapat komite audit memiliki pengaruh positif pada biaya keagenan, struktur hutang tidak memengaruhi biaya keagenan, rapat dewan komisaris, *board size*, dualitas, dan *block ownership* berpengaruh negatif pada biaya keagenan.

Di negara maju, penelitian dilakukan oleh Kusnadi (2003) di Singapura dan menemukan bahwa ukuran dewan tidak dapat mengurangi biaya keagenan sedangkan ukuran komite audit dapat meminimalisir biaya keagenan. Singh dan Davidson (2003) menemukan bahwa ukuran dewan tidak dapat meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan di Amerika.

Putu dan I Wayan (2014) meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Biaya Keagenan”. Sampel pada penelitian diseleksi dengan metode *purposive sampling.* Berdasarkan data yang tersedia, sampel terdiri dari 45 emiten. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sedehana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, penerapan *good corporate governance* berpengaruh negatif pada biaya keagenan. Penerapan *good corporate governance* yang semakin intensif mampu mengurangi biaya keagenan.

Berdasarkan fenomena-fenomena serta perbedaan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *agency cost* yang dimoderasi oleh risiko bisnis.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *agency cost*?
2. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh *agency cost* terhadap nilai perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap *agency cost?*
5. Bagaimana risiko bisnis memoderasi hubungan *good corporate governance* dan *agency cost*?
6. **Batasan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian dan membatasi bidang yang akan diteliti, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

* + - 1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *agency cost*?
      2. Bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap *agency cost*?
      3. Bagaimana risiko bisnis memoderasi hubungan *good corporate governance* dan *agency cost*?

1. **Batasan Penelitian**

Dalam rangka membuat penelitian lebih fokus dan terarah, maka peneliti menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

* + - 1. Objek-objek penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
      2. Data yang digunakan adalah data pada periode 2015 sampai dengan 2017.
      3. Data penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Pusat Data Pasar Modal (PDPM) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan sumber informasi lain seperti *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Agency Cost yang dimoderasi oleh Risiko Bisnis?”

**F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

* 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *agency cost.*
  2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap *agency cost*.
  3. Untuk mengetahui bagaimana risiko bisnis memoderasi hubungan antara *good corporate governance* dan *agency cost*.

**G. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi pihak manajemen untuk mengurangi biaya agensi.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta pengayaan peneliti dalam memahami teori-teori manajemen keuangan yang bersifat fundamental maupun implikasinya pada perusahaan.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan pembanding jika ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya agensi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.